



Dinamika Komunikasi Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Pemerintah Dan Masyarakat

Fatan Audi Havip¹⁾; Susie Perbawasari²⁾; Agus Rahmat³⁾

^{1); 2); 3)} Faculty of Communication, Universitas Padjadjaran Bandung

Email: ¹⁾ fatn21001@mail.unpad.ac.id; ²⁾ susie.perbawasari@unpad.ac.id; ³⁾ agus.rahmat@unpad.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [27 Juli 2023]

Revised [11 November 2023]

Accepted [15 Desember 2023]

KEYWORDS

Forest fire, Jambi, Dynamics of Communication

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) telah mendapat perhatian yang sangat besar karena dampaknya yang besar terhadap lingkungan. Api berkontribusi terhadap laju deforestasi, hilangnya habitat & kepunahan spesies, serta emisi gas rumah kaca. Jambi merupakan provinsi terkecil dari provinsi-provinsi di Sumatra yang menjadi wilayah rawan karhutla dibandingkan Provinsi Riau dan Sumatera Selatan. Studi ini mengkaji dinamika komunikasi mitigasi bencana karhutla antara pemerintah dan masyarakat di kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, yang merupakan kabupaten dengan tingkat karhutla paling tinggi. Melalui penggunaan paradigma konstruktivisme, kajian ini diharapkan dapat menyibak dinamika-dinamika komunikasi bencana karhutla pemerintah dan masyarakat yang terjadi di Provinsi Jambi dan bagaimana dinamika tersebut menyebabkan kebakaran hutan dan lahan di Jambi yang terjadi di setiap tahunnya. Hasil dari penelitian ini menemukan dinamika-dinamika komunikasi antara pemerintah dengan pemerintah, pemerintah dengan masyarakat, dan masyarakat dengan masyarakat dalam mitigasi bencana karhutla di Provinsi Jambi.

ABSTRACT

Forest and land fires (Karhutla) have received great attention because of their large impact on the environment. Fire contributes to deforestation rates, habitat loss & species extinction, as well as greenhouse gas emissions. Jambi is the smallest province of the provinces in Sumatra which is a land and forest fire-prone area compared to the provinces of Riau and South Sumatra. This study examines the dynamics of karhutla disaster mitigation communication between the government and the community in Muaro Jambi district, Jambi Province, which is the district with the most high level of karhutla. Through the use of a constructivist paradigm, this study is expected to uncover the dynamics of communication between the government and community karhutla disasters that occur in Jambi Province and how these dynamics cause forest and land fires in Jambi which occur every year. The results of this study found the dynamics of communication between the government and the government, the government and the community, and the community and the community in mitigating karhutla disasters in Jambi Province.

PENDAHULUAN

Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) telah mendapat perhatian yang sangat besar karena dampaknya yang besar terhadap lingkungan. Api berkontribusi terhadap laju deforestasi, hilangnya habitat & kepunahan spesies, serta emisi gas rumah kaca (Prasetyo et al., 2016).

Merujuk pada Instruksi Presiden No 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (RI, 2020), terdapat setidaknya 6 poin penting yang diinstruksikan oleh presiden pada Inpres tersebut, yaitu: Pertama, agar pencegahan diutamakan. Deteksi dini perlu dilakukan dengan pemantauan di daerah rawan titik api. Bukan memadamkan api sudah menjalar tetapi lakukan tindakan sebelum api besar. Pasalnya, ketika api sudah besar, sudah sulit dipadamkan meski dengan *water bomb*.

Kedua, infrastruktur mitigasi sangatlah esensial terutama di akar rumput. Presiden memerintahkan perangkatnya agar memanfaatkan keberadaan teknologi. Presiden juga menginginkan mitigasi melibatkan aparat desa, babinsa, dan babinkamtibmas. Dikatakannya, sosialisasi dan edukasi akan bahaya karhutla harus diberikan secara berkelanjutan kepada masyarakat dan perusahaan dan memasukkan peran tokoh-tokoh yang dianggap berpengaruh di dalamnya.

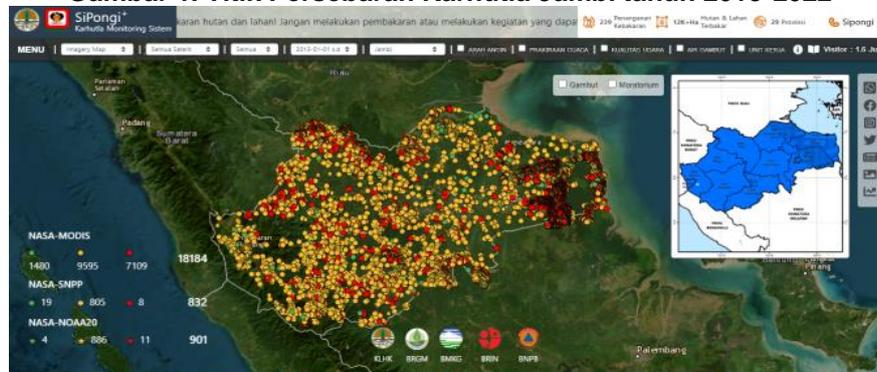
Ketiga, Solusi permanen merupakan solusi yang diperlukan untuk karhutla. Hampir 100 persen kebakaran hutan disebabkan oleh aktivitas manusia dengan motif ekonomi. Di masa depan, Presiden tidak ingin membakar hutan menjadi cara untuk pembukaan lahan, baik oleh masyarakat maupun perusahaan. Keempat, pengaturan ekosistem gambut di area hidrologi gambut terus berlanjut. Presiden mengklaim sudah menginstruksikan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) agar fokus memastikan tinggi muka air tanah selalu terjaga. "Bangun banyak tambak, buat banyak kanal, buat sumur bor dengan berbagai teknik pembahasan lainnya agar lahan gambut tetap basah," katanya. Instruksi kelima, meminta Gubernur, Bupati, Walikota, Pangdam, Danrem, Dandim, Kapolda, dan Kapolri tanggap dalam pengendalian titik api.

Terakhir, Presiden berpesan agar hukum yang ditegakkan oleh polisi tidak tebang pilih, tidak hanya masyarakat, tapi juga perusahaan yang melanggar.

Jambi merupakan salah satu provinsi rawan karhutla di Pulau Sumatera. Bersama Riau dan Sumatera Selatan, Provinsi Jambi adalah provinsi yang selalu terkena dampak karhutla bahkan dari tahun 1997 (Asteriniah & Sutina, 2017).

Pada periode 10 tahun terakhir dengan rentan waktu 2013-2022, terdapat 18.184 titik kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi. Data ini merupakan data tangkapan satelit NASA-MODIS yang digunakan KLHK dalam memantau titik api di Indonesia (KLHK, 2023).

Gambar 1. Titik Persebaran Karhutla Jambi tahun 2013-2022



Selama periode 10 tahun terakhir tersebut ditemukan grafik fluktuasi dalam penyebaran titik karhutla di Provinsi Jambi. Dampak terparah dari karhutla terjadi di tahun 2015 dan 2019 yang merupakan siklus 4 tahunan. Di samping hal tersebut, karhutla di provinsi Jambi menunjukkan penurunan tren di 3 tahun terakhir.

Gambar 2. Titik Karhutla Provinsi Jambi Periode 2013-2022



Dari grafik di atas menunjukkan karhutla di Jambi terbagi dalam 3 fase dalam 10 tahun terakhir dimana fase pertama merupakan fase dengan dampak terparah di Provinsi Jambi. Rentan waktu 2013-2015 terdapat 9.834 titik karhutla, lalu 7896 titik rentan waktu 2016-2019, dan hanya terdapat 427 titik karhutla periode tahun 2020-2022.

Walaupun menjadi wilayah rawan karhutla, Provinsi Jambi merupakan provinsi terkecil jika dibandingkan oleh 2 Provinsi rawan karhutla lain di Sumatera. Provinsi Sumatera Selatan memiliki luas wilayah 91.806,36 km² (Bappeda Sumsel, 2014), Provinsi Riau memiliki luas wilayah 89.936 km². Sementara itu Provinsi Jambi hanya memiliki luas wilayah 49.027 km² (BAPPEDA Provinsi Jambi, 2016) yang merupakan Provinsi terkecil dari ketiga wilayah rawan karhutla di Pulau Sumatera.

Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Mitigasi bencana karhutla telah dilakukan dari tahun ke tahun, baik oleh pemerintah, maupun masyarakat (Arifin, 2020). Dalam dinamika mitigasi bencana tidak lepas dari dinamika komunikasi dalam pelaksanaannya. Dinamika komunikasi mengacu pada cara orang berinteraksi satu sama lain melalui komunikasi verbal dan non verbal. Ini melibatkan pertukaran informasi dan ide antara individu atau kelompok, cara pesan disampaikan, ditafsirkan, dan ditanggapi (Adler et al., 2021). Sedangkan mitigasi bencana adalah langkah-langkah dan strategi yang digunakan untuk mengurangi dampak dan risiko bahaya, melalui tindakan proaktif yang diambil sebelum, selama atau setelah bencana atau kejadian darurat. Mitigasi bencana merupakan komponen penting dari pemerintah daerah maupun nasional keamanan karena krisis mempengaruhi pembangunan kota dalam jangka panjang (Chirisa, 2020). Sehingga dapat disimpulkan dari dua pengertian di atas dinamika komunikasi mitigasi bencana adalah cara orang berinteraksi baik verbal maupun non verbal untuk menentukan langkah-langkah dan strategi yang



digunakan untuk mengurangi dampak dan risiko bahaya, melalui tindakan proaktif yang diambil sebelum, selama atau setelah bencana atau kejadian darurat.

Penelitian sebelumnya menyebutkan dari beberapa penyebab karhutla adalah kegiatan pengolahan lahan dengan api tanpa perhitungan. Konflik kepentingan tata cara pengolahan lahan juga merupakan penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Yunardy et al., 2020).

Karhutla juga terjadi karena beberapa faktor. *Pertama*, sebab regulasi yang mengatur problematika hutan. Investor yang dengan mudahnya memiliki akses pembukaan hutan menjadi lahan dan mereka juga yang memiliki *finansial power* menjadikan para investor dengan mudahnya memiliki dan menjadikan lahan guna kepentingan bisnis. Sampai saat ini, walaupun sudah diamanatkan UUPA tahun 1960, tapi tetap saja belum ditemukan undang-undang yang mengatur kepemilikan dan hak batas maksimum penguasaan tanah (Sumardjono, 2021). *Kedua*, pasar internasional yang menuntut komoditas tertentu menjadikan pembakaran lahan semakin massif. Komoditi seperti sawit menjadi salah satu promadona pasar internasional. Selama periode 2016-2020, ada peningkatan sebanyak 14 ribu juta hektar di Indonesia (Kementan, 2020). Hal ini juga merupakan masalah multi dimensi sebab ada peran pemodal yang lebih sering tidak peduli akan dampak lingkungan, pembuat kebijakan yang permisif, dan masyarakat yang secara ekonomi membutuhkan mata pencaharian. Selain itu, lemahnya pengawasan pemerintah di tingkat daerah ataupun pusat akan karhutla, lemahnya tindakan hukum menjadikan pelaku pembakaran tidak jera dan biasanya tindakan hukum hanya berlaku terhadap masyarakat yang tidak memiliki kekuatan.

Studi ini membahas dinamika komunikasi dalam mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan pemerintah dan masyarakat. Studi ini dilakukan dikecamatan kumpeh, kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi yang merupakan wilayah dengan dampak karhutla terbesar di Jambi. Kumpeh juga merupakan satu-satunya wilayah di Indonesia yang mengalami peristiwa langit merah saat karhutla tahun 2019.

Studi ini mengkaji sejauh mana dinamika komunikasi yang dikategorikan menjadi 3, dinamika komunikasi mitigasi sesama pemerintah, sesama masyarakat, dan pemerintah dengan masyarakat.

LANDASAN TEORI

Teori Komunikasi Lingkungan

Komunikasi lingkungan adalah bidang dalam disiplin komunikasi, dan juga meta bidang yang melintasi disiplin ilmu. Penelitian dan teori di lapangan disatukan oleh fokus topikal pada komunikasi dan hubungan manusia dengan lingkungan. Peneliti yang mempelajari komunikasi lingkungan sangat peduli dengan cara orang berkomunikasi tentang alam karena mereka percaya bahwa komunikasi semacam itu memiliki efek yang luas pada saat krisis lingkungan yang sebagian besar disebabkan oleh manusia.

Inti dari teori komunikasi lingkungan adalah asumsi dari teori ini. Asumsi tersebut adalah cara kita berkomunikasi sangat memengaruhi persepsi kita tentang dunia kehidupan; pada gilirannya, persepsi ini membantu membentuk bagaimana kita mendefinisikan hubungan kita dengan dan di dalam alam dan bagaimana kita bertindak terhadap alam (Littlejohn & Foss, 2013). Dengan demikian, peneliti komunikasi lingkungan sering berbicara tentang komunikasi tidak hanya mencerminkan tetapi juga membangun, memproduksi, dan menaturalisasi hubungan manusia tertentu dengan lingkungan.

Teori-teori yang digunakan para peneliti untuk menyelidiki asumsi-asumsi ini sangat beragam dalam orientasi epistemologis dan metodologisnya. Karena hubungan manusia dengan alam dinegosiasikan dalam komunikasi budaya, media massa, komunikasi publik, komunikasi interpersonal, budaya populer, dan sebagainya, teori komunikasi lingkungan berasal dari teori budaya, teori media, teori retorika, teori gerakan sosial, teori budaya populer, dan banyak daerah lainnya. Dengan cara ini, peneliti komunikasi lingkungan telah mengakses teori yang ada untuk dijadikan kerangka kerja konseptual untuk pertanyaan dan studi mereka (Cox, 2018).

Karena penelitian komunikasi lingkungan melihat masyarakat manusia serta dunia alam di luar manusia, banyak ahli komunikasi lingkungan tertarik pada teori wacana yang diinformasikan oleh poststrukturalisme, serta disiplin ilmu kontemporer seperti studi sains dan studi budaya. Diinformasikan oleh tradisi-tradisi ini, banyak sarjana komunikasi lingkungan memandang sistem representasi kita sebagai simbolik dan material. Ini berarti para sarjana memandang dunia material sebagai membantu membentuk komunikasi dan komunikasi sebagai membantu membentuk dunia material (Milstein, 2008).

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Menurut Creswel (Creswell, 2013), paradigma konstruktivisme dapat dikenali dari tiap-tiap individu yang berusaha untuk memaknai sebuah makna yang bermacam-macam. Penelitian ini berusaha untuk memahami peristiwa sosial sebagai karakteristik dari paradigm konstruktivisme. Ditambah, Neuman (Neuman, 2014), mengartikan paradigma konstruktivisme merupakan upaya untuk memahami dan

menjelaskan tindakan sosial yang bermakna. Dari dua pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa paradigma ini merupakan paradigma yang menitikberatkan dalam pemahaman makna dari sebuah kejadian ataupun peristiwa.

Melalui penggunaan paradigma konstruksi sosial, kajian ini diharapkan dapat menyibak dinamika-dinamika komunikasi bencana karhutla pemerintah dan masyarakat yang terjadi di Provinsi Jambi dan bagaimana dinamika tersebut menyebabkan kebakaran hutan dan lahan di Jambi yang terjadi di setiap tahunnya.

Dalam studi ini, peneliti datang langsung ke lokasi penelitian untuk melakukan observasi dengan melakukan interaksi kepada masyarakat di Kecamatan Kumpeh sebagai informan. Di samping itu, untuk mendapatkan validitas penelitian lebih lanjut, peneliti akan meminta kepada key informan yaitu pejabat pelaksana instansi-instansi yang tergabung dalam satgas karhutla (BPBD, TNI/Polri, BMKG, Manggala Agni) dan juga penanggung jawab organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Provinsi Jambi, serta tokoh adat di Kecamatan Kumpeh.

Ada pula pemakaian jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus adalah dimana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas, terhadap satu atau lebih orang. Suatu kasus terikat oleh waktu dan aktivitas dan peneliti melakukan pengumpulan data secara mendetail dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dan dalam waktu yang berkesinambungan. Salah satu dari karakteristik studi kasus adalah penelitian dilakukan secara rinci mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga, atau gejala tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

Dinamika komunikasi mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan pemerintah dan masyarakat di Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi meliputi permasalahan komunikasi yang terjadi baik antar pemerintah, pemerintah dengan masyarakat, maupun masyarakat dengan masyarakat.

Peneliti menemukan setidaknya terdapat enam permasalahan pokok komunikasi yang terjadi pada mitigasi bencana karhutla di Jambi. Permasalahan komunikasi yang terjadi bisa jadi mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Kumpeh selalu terjadi setiap tahunnya ketika musim kemarau.

Tabel 1. Klasifikasi permasalahan komunikasi mitigasi karhutla kecamatan Kumpeh

Jenis Permasalahan	Aktor Komunikasi	Permasalahan
Instansi dengan Instansi	BPBD, TNI/Polri, BMKG, Manggala Agni	1. Kesalahpahaman Informasi antar Instansi 2. Perbedaan Penanganan Tingkat Kepercayaan Titik <i>Hotspot</i>
Instansi dengan Masyarakat	BPBD, TNI/Polri, BMKG, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, Masyarakat desa Gambut Jaya, Masyarakat desa Seponjen	1. Tradisi Buka Lahan Masyarakat sebagai Masalah Utama Karhutla 2. Masyarakat dianggap Menutupi Pelaku Karhutla 3. Ketidakpercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah
Masyarakat dengan Masyarakat	Masyarakat Peduli Api, Masyarakat desa Gambut Jaya, Masyarakat desa Seponjen	1. Polarisasi Masyarakat dalam mitigasi Karhutla

Sumber: Data Diolah, 2023

Permasalahan Instansi dengan Instansi *Kesalahpahaman Informasi Antar Instansi*

Satgas kebakaran hutan dan lahan merupakan satgas yang terbentuk dari gabungan berbagai instansi yang memiliki fungsi masing-masing dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Banyaknya instansi dan oknum yang terlibat dalam satuan tugas ini menjadikan informasi yang masuk sering sekali berkembang dan menjadikan informasi diartikan dengan persepsi masing-masing anggota. Luasnya daerah cakupan rawan karhutla memungkinkan hal tersebut terjadi. Ditambah kondisi sarana penunjang komunikasi seperti teknologi komunikasi yang tidak merata di tiap-tiap daerah.

“Tidak jarang terjadi kesalahpahaman dalam melakukan patroli rutin antara Babinsa dengan Manggala Agni seperti waktu patroli yang tiba-tiba berubah tanpa pemberitahuan, anggota patroli yang tidak on time, dan masih banyak lagi kejadian di lapangan yang sulit diprediksi. Sebagai contoh kemarin yang seharusnya



patroli sudah dilakukan dari pagi tetapi karena anggota satgas telat datang dengan alasan yang tidak dapat diterima menjadikan patroli karhutla molor dan membuat kondisi tidak kondusif". (Suroso, Babinsa desa Gambut Jaya, Komunikasi Pribadi, 7 Juni 2023).

Anggota Manggala Agni menambahkan beratnya tugas yang mereka emban menjadikan komunikasi yang kurang tersampaikan dengan baik dapat menjadikan gesekan-gesekan yang mengakibatkan kondisi di lapangan terkadang tidak kondusif. Hal tersebut dapat dikatakan wajar karena resiko yang mereka hadapi sebagai orang yang berada di garis depan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Muaro Jambi.

"Selisih paham sering kali terjadi dan kemungkinan terjadinya konflik internal pasti ada walaupun memang tidak besar. Instansi yang memiliki kedudukan lebih tinggi mungkin saja menerapkan budaya instansinya di satgas ini dalam penanganan karhutla. Namun hal tersebut dapat diantisipasi karena kita ada evaluasi di setiap harinya setelah melakukan patroli terpadu". (Azwar, Manggala Agni, Komunikasi Langsung, 7 Juni 2023).

PLH BPBD Provinsi Jambi, Dody Chandra, menambahkan siklus 4 tahunan karhutla menjadikan informasi yang tersebar antar instansi di satgas karhutla juga terpengaruh.

"Kita belajar dari tahun 2015 dan 2019 dimana fenomena el nino mengakibatkan karhutla semakin parah. Hal tersebut juga mengakibatkan sinergi antar instansi lebih diuji. Distribusi informasi sering sekali lebih bermasalah ketika periode-periode 4 tahunan ini. bayangkan satu atau dua tahun sebelumnya siklus karhutla yang terkesan landai tiba-tiba akan naik di siklus 4 tahunan. Tapi kita sudah belajar dari tahun 2015 dan 2019 bagaimana mengatasi masalah informasi yang berkembang di dalam internal satgas. Teknologi informasi juga berperan penting dalam meminimalisir miss informasi yang diberikan dari hulu ke hilir. Fiture seperti group whatsapp sangat membantu pendistribusian informasi. Walaupun kadang terkendala di wilayah tertentu seperti sulitnya jaringan dan kesediaan listrik". (Dody Chandra, PLH BPBD Jambi dan PJ satgas udara, komunikasi langsung, 3 Juni 2023).

Perbedaan Penanganan Tingkat Kepercayaan Titik Hotspot

Terdapat tiga tingkat selang kepercayaan atau confidence level yang menunjukkan tingkat kepercayaan bahwa titik api yang terpantau dari data satelit benar-benar merupakan peristiwa kebakaran yang sebenarnya terjadi di lapangan. Semakin tinggi interval kepercayaan, semakin tinggi pula potensi titik api sebenarnya karhutla yang terjadi. Terdapat tiga kelas tingkat kepercayaan pada citra satelit hotspot.

- Tingkat kepercayaan untuk hotspot C <30 persen berarti interval kepercayaannya rendah dan tindakan yang diharapkan perlu diperhatikan.
- Tingkat kepercayaan untuk hotspot C <80 persen berarti interval kepercayaan nominal dan tindakan yang diharapkan waspada.
- Tingkat kepercayaan untuk hotspot C < 100 persen berarti selang kepercayaan yang tinggi dengan penanggulangan segera.

BMKG dalam sosialisasi karhutla dijambi menekankan bahwa seharusnya ketika tingkat kepercayaan sudah di atas 50 persen seharusnya sudah ada tindakan pengecekan petugas di lapangan. Karena dengan tingkat kepercayaan 50 persen khususnya di wilayah lahan gambut sudah memungkinkan terjadinya kebakaran.

"BMKG sudah menyampaikan pada sosialisasi pencegahan karhutla bahwa seharusnya ketika BMKG sudah memberikan informasi tingkat kepercayaan di atas 50 persen sebaiknya sudah dilakukan pengecekan, khususnya di lahan gambut. Karena seperti yang kita tahu kebakaran di lahan gambut biasanya api berada di permukaan. Atasnya tidak terlihat terbakar tapi bawahnya sudah terbakar. Biasanya hanya asap yang nampak di atasnya. Tapi sejauh ini tindakan penanganan bau dilakukan ketika tingkat kepercayaan di titik hotspot sudah mencapai 70 persen yang artinya kemungkinan besar sudah terbakar". (Anisa, BMKG, Komunikasi Langsung, 15 Juni 2023).

PLH BPBD Provinsi Jambi beranggapan kurangnya personil di lapangan juga mempengaruhi eksekusi penanganan karhutla di lapangan. Ia menyebutkan tingkat kepercayaan di atas 70 persen sudah menjadi acuan berdasarkan anggota dan sarana prasarana yang ada di lapangan. Dody Chandra juga menambahkan titik panas dan titik api suatu hal yang berbeda. Kemungkinan sudah menjadi titik api ketika sudah di atas 70 persen tingkat kepercayaannya.

"Ketika tingkat kepercayaan hotspot sudah di atas 70 persen tim akan bergerak melakukan mitigasi karhutla. Tim melakukan cross check. Kalau sudah titik api. Satgas darat dan udara bergerak. Satgas darat terlebih dahulu bergerak karena lebih real time. Kalau sudah tidak mampu satgas udara melakukan bombing". (Dody Chandra, PLH BPBD Jambi dan PJ satgas udara, komunikasi langsung, 3 Juni 2023).

Permasalahan Insatansi dengan Masyarakat

Tabel 2. Ringkasan Informan Mengenai Permasalahan Instansi dengan Masyarakat

Nama & Tanggal	Jabatan	Media	Perihal
----------------	---------	-------	---------

Datuk Tamin 1 Juni 20213	Tokoh Masyarakat Desa Seponjen	Telepon	Izin konsensi sebagai penyebab utama kebakaran hutan skala besar
Kurniawan 20 November 2022	Walhi	Komunikasi Langsung	Pembahasan mengenai merun
Aan 8 Juni 2023	Walhi Jambi	Komunikasi Langsung	Cara dan pelaksanaan merun
Dody Chandra 3 Juni 2023	PLH BPBD Jambi dan PJ satgas udara	Komunikasi Langsung	Membedakan titik api dengan titik panas serta pembahasan merun
Ipda Andico Jumarel 25 Mei 2023	Perwira Pengendali ASAP DIGITAL	Komunikasi Langsung	Penanganan pelaku karhutla
Ermansyah 8 Juni 2023	Babinkantibnas desa Gambut Jaya	Komunikasi langsung	penegakan hukum pelaku karhutla di lapangan
AKP Rico Antoni 25 Mei 2023	Disrimsus Polda Jambi	Komunikasi langsung	Pendekatan personal kepada masyarakat sebagai solusi
Heri 2 Juni 2023	Tokoh Masyarakat Desa Gambut Jaya	Komunikasi telepon	Tindakan hukum kepada perusahaan
Eko 8 Juni 2023	Manajer advokasi Walhi	Komunikasi langsung	Kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat

Sumber: Data Diolah, 2023

Tradisi Buka Lahan Masyarakat sebagai Masalah Utama Karhutla

Tradisi merun walaupun merupakan kearifan lokal yang bersifat tradisional, namun pelaksanaannya sudah diatur sedemikian rupa. Masyarakat seperti membuat tumpukan-tumpukan jerami yang dikumpulkan dan menjulang tinggi di beberapa titik dan membakarnya. menurut Kurniawan, merun sendiri di bagi menjadi 2.

“Rekomendasi merun yang dianggap aman adalah merun yang dilakukan di sawah. Sedangkan merun yang dilakukan di hutan bukan merupakan merun yang aman untuk dilakukan”. (Kurniawan Walhi, Komunikasi langsung, 20 November 2022).

Walhi menambahkan merun memang sudah menjadi kultur bagi masyarakat khususnya masyarakat agraria di Jambi.

“Merun sendiri memiliki tata cara dalam pelaksanaannya dan biasanya masyarakat akan memilih lahan mana yang sudah sesuai untuk dilakukan merun. Luasan praktik merun juga berkisar 1-2 hektar luas tanah. Sangat tidak mungkin masyarakat melakukan pembakaran tanah berpuluh bahkan beratus hektar”. (Aan Walhi Jambi, Komunikasi langsung, 8 Juni 2023).

Sementara itu BPBD menganggap merun merupakan penyebab utama terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Jambi.

“Pertama kita harus membedakan pengertian titik api dan titik panas. Kalau titik panas biasanya timbul dari atap seng pemukiman warga atau asap pabrik. Sedangkan titik api merupakan api yang sudah muncul karena pembakaran. Merun merupakan salah satu tradisi yang sering memunculkan titik api dalam kebakaran hutan dan lahan”. (Dody Chandra, PLH BPBD Jambi dan PJ satgas udara, komunikasi langsung, 3 Juni 2023).

Pengelolaan lahan pertanian secara tradisional telah dikenal oleh masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian baik di Provinsi Jambi maupun di daerah lain di Indonesia, pola tradisional yang ada pada masyarakat dalam membuka lahan pertanian yang ada tidak lepas dari pengaturannya. yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, tata cara pembukaan lahan untuk pertanian dan perkebunan dalam satu kawasan telah berubah sejak masuknya industri besar, perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman industri dan pertambangan.

Masyarakat dianggap Menutupi Pelaku Karhutla

Menurut keterangan petugas Babinkantibnas desa Gambut Jaya, Ermansyah, petugas di darat sering sekali “kecolongan” dalam melakukan penegakan hukum.

“tugas kami sebagai petugas lapangan lebih sering mengontrol sarana prasarana penunjang kegiatan mitigasi karhutla. Ada pelaku yang tertangkap tetapi itu sangat jarang karena biasanya warga sekitar dan ditutupi keberadaannya”. (Ermansyah, Babinkantibnas desa Gambut Jaya, Komunikasi langsung, 8 Juni 2023).

Pelaku pembakaran lahan biasanya bekerja dalam kelompok kecil dan tidak sedang melakukan tradisi merun. Membuka lahan dengan cara dibakar merupakan cara yang dianggap paling efektif dalam membuka lahan karena dirasa cara paling murah dan hasilnya lebih luas dan efisien.



Ketidakpercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah

Izin konsensi yang diberikan pemerintah kepada perusahaan menjadikan lahan masyarakat semakin menyempit. Setiap ada izin yang diberikan kepada perusahaan, disitu pula aka nada konflik di masyarakat. Dalam penanganan karhutla di kecamatan Kumpeh, Jambi, titik-titik posko satuan tugas penanganan karhutla lebih banyak ditempatkan di wilayah izin-izin konsensi yang artinya penanganan karhutla lebih dikhususkan kepada perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan kehutanan. Selain itu penindakan hukum di rasa lebih tajam ke bawah daripada ke atas. Masyarakat yang kedapatan melakukan pembakaran lahan akan ditindak berdasarkan hukum yang berlaku. Sementara itu, perusahaan-perusahaan yang besar ketika lahan terbakar di wilayah konsensi mereka seolah-olah dibiarkan tanpa ada tindakan hukum.

“Memang ada perusahaan yang dikenakan tindakan hukum tetapi itu tidak menyeluruh. Terlebih perusahaan yang memiliki financial power yang sangat besar akan lolos dari jerat hukum pelanggaran karhutla”. (Heri, Desa Gambut Jaya, Komunikasi telepon, 2 Juni 2023).

Permasalahan Masyarakat dengan Masyarakat
Polarisasi Masyarakat dalam Mitigasi Karhutla

Jauh sebelum karhutla merupakan kejadian tahunan yang terjadi di Muaro Jambi, penduduk tidak terpolarisasi dengan bencana karhutla yang menimpa mereka. Kebakaran yang terjadi tidak pernah dalam skala besar dan biasanya hanya mengikuti tradisi konservatif yang dilakukan turun temurun. Dampak asap dari kebakaran yang dihasilkan juga tidak sampai berdampak langsung terhadap mereka, terutama kesehatan mereka. Semenjak karhutla menjadi bencana tahunan dan skalanya semakin besar masyarakat terbagi-bagi dalam menyikapi permasalahan tersebut.

“Masyarakat di desa di bentur-benturkan, Di muaro jambi, lahan gambut sudah dikuasai perusahaan. Pemegang izin konsensi terkesan membiarkan masyarakat masuk ke area gambut. Dari perusahaan ada akses ke taman nasional yang seharusnya bukan merupakan izin konsensi. Jika ada masalah kebakaran yang disalahkan masyarakat oleh masyarakat lain yang biasanya berada di bawah perintah perusahaan”. (Aan Walhi, Komunikasi Pribadi, 8 Juni 2023).

Jelas hal ini merupakan permasalahan komunikasi dimana pola kebakaran hutan dan lahan menjadikan masyarakat yang tinggal menjadi terbagi-bagi. Permasalahan lain juga timbul akibat polarisasi masyarakat seperti konflik sosial antar masyarakat yang sebelumnya jarang sekali terjadi. Ada masyarakat yang berada di bawah komando pemerintah. Ada pula masyarakat yang berada di bawah perintah perusahaan. Serta ada masyarakat yang tetap mempertahankan budaya lama mereka dan lahan mereka dari izin konsensi yang seperti tidak terbandung di Muaro Jambi.

“Dahulu tidak ada yang namanya masalah kebakaran. Warga dulu juga membakar lahan mengikuti tradisi nenek moyang tapi semua ada aturannya. Semenjak perusahaan-perusahaan besar datang kemari, sering terjadi konflik antar kami (masyarakat)”. (Heri, Warga desa Gambut Jaya, Komunikasi telepon, 2 Juni 2023).

Tabel 3 : Ringkasan Informan Mengenai Permasalahan Masyarakat dengan Masyarakat

Nama	Jabatan	Media	Perihal
Aan 8 Juni 2023	Walhi Jambi	Komunikasi Pribadi	Polarisasi masyarakat dalam permasalahan karhutla
Heri 2 Juni 2023	Warga desa Gambut Jaya	Komunikasi telepon	Polarisasi masyarakat dalam permasalahan karhutla

Sumber: Data Diolah, 2023

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Merujuk pada Instruksi Presiden No 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, terdapat enam poin utama yang disampaikan oleh Presiden Indonesia dalam langkah mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan. Yaitu utamakan pencegahan, pentingnya infrastruktur mitigasi, mencari solusi permanen, pengaturan ekosistem gambut, tanggap dalam pengendalian titik api, dan penegakan hukum secara menyeluruh.

Dalam merealisasikan hal tersebut, perlu adanya kolaborasi antar seluruh lapisan yang memiliki kewenangan dalam penanganan karhutla. Hal tersebut tidak hanya mencakup lapisan pemerintah saja, tetapi juga lapisan masyarakat agar dapat bersama-sama melakukan mitigasi bencana karhutla.

Dalam penanganan karhutla, terdapat beberapa permasalahan komunikasi yang berdampak pada baik buruknya mitigasi yang dilakukan, baik itu permasalahan antar instansi, instansi dengan masyarakat, dan antar masyarakat.

Pentingnya komunikasi yang baik diharapkan dapat mengurangi permasalahan yang terjadi dan mengurangi dinamika-dinamika komunikasi mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi secara khusus, dan di seluruh Indonesia pada umumnya.

Saran

Komunikasi yang baik dalam koordinasi satgas diperlukan dalam mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan. Selain itu peran aktif instansi dalam sosialisasi kepada masyarakat juga diperlukan agar pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat dapat tersampaikan dengan baik.

Kepercayaan masyarakat juga harus dibangun oleh instansi agar instansi dan masyarakat dapat bersama-sama mengatasi permasalahan mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan di Jambi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adler, R. B., Winder, C., Rosenfeld, L. B., & II, R. F. P. (2021). *Interplay: The Process of Interpersonal Communication* (14th ed.). Oxford University Press. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>
- Arifin, M. Z. (2020). STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATANGHARI DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN. In *PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN* (Vol. 8, Issue 75). [https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.smr.2020.02.002%0Ahttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049%0Ahttp://doi.wiley.com/10.1002/anie.197505391%0Ahttp://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205%0Ahttp://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205%0A](https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.smr.2020.02.002%0Ahttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049%0Ahttp://doi.wiley.com/10.1002/anie.197505391%0Ahttp://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205%0Ahttp://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205%0Ahttp://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205%0A)
- Asteriniah, F., & Sutina. (2017). Implementasi Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Oki. *Jurnal Abdimas Mandiri*, 1(2), 71–77.
- BAPPEDA Provinsi Jambi. (2016). Luas wilayah provinsi jambi tahun 2015. *Bappeda Provinsi Jambi*, 1, 1–13. http://bappeda.jambiprov.go.id/welcome/download_file_buku/BAB-I.pdf
- Bappeda Sumsel. (2014). *RPJMD Prov Sumsel 2013-2018*. 1–134.
- Chirisa, I. (2020). Disaster Mitigation and Response in Cities: Drawing Lessons from COVID-19 Pandemic. *Journal of Social Sciences*, 63(1–3). <https://doi.org/10.31901/24566756.2020/63.1-3.2262>
- Cox, R. (2018). Nature's "Crisis Disciplines": Does Environmental Communication Have an Ethical Duty? *Environmental Communication*, 1(1), 5–20. <https://doi.org/10.1080/17524030701333948>
- Creswell, J. W. (2013). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches* (p. 273). SAGE Publications.
- Kementan. (2020). Data Dan Fakta Sawit Indonesia : Luas , Sebaran Dan Tantangannya Webinar ; Ngopini Sawit. *Webinar ; Ngopini Sawit*.
- KLHK. (2023). *SiPongi+ Karhutla Monitoring Sistem*. <https://sipongi.menlhk.go.id/>
- Littlejohn, S. W., & Foss, K. A. (2013). *Encyclopedia of Communication Theory*. In *University of New Mexico*. SAGE Publications. <https://doi.org/10.4324/9781315228846-3>
- Milstein, T. (2008). When Whales "Speak for Themselves": Communication as a Mediating force in Wildlife Tourism. *Environmental Communication*, 2(2), 173–192. <https://doi.org/10.1080/17524030802141745>
- Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. In *Teaching Sociology* (seventh, Vol. 30, Issue 3). Pearson Education Limited. <https://doi.org/10.2307/3211488>
- Prasetyo, L. B., Dharmawan, A. H., Nasdian, F. T., & Ramdhoni, S. (2016). Historical Forest fire Occurrence Analysis in Jambi Province During the Period of 2000 – 2015: Its Distribution & Land Cover Trajectories. *Procedia Environmental Sciences*, 33, 450–459. <https://doi.org/10.1016/j.proenv.2016.03.096>
- RI, B. (2020). Presiden Republik Indonesia Peraturan Presiden Republik Indonesia. *Demographic Research*, 4–7.
- Sumardjono, M. (2021). Konflik Agraria Tak Kunjung Usai. *Kompas*.
- Yunardy, S., Ulya, N. A., & Agency, D. (2020). *Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Sebuah Upaya Resolusi Konflik Budaya Lokal dan Kebijakan Formal*. September 2020.